

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Sebelumnya

Membahas terkait literatur sebelumnya, berikut ialah penelitian revoew sebelumnya yang membahas terkait pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Binawati & Nindyaningsih (2022)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. Populasi penelitian ditentukan pada SKPD di Pemkab Klaten dengan jumlah 152 responden. Teknik pemilihan sampel berdasarkan pada metode *purposive sampling*. Hasil riset menunjukkan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Persamaan penelitian:

- a) Variabel independen membahas penerapan sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern
- b) Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemda.
- c) Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey atau sebar kuesioner.

Perbedaan penelitian:

- a) Penelitian terdahulu menggunakan populasi SKPD di berbeda, yakni pada Pemkab Klaten, sedangkan penelitian sekarang menggunakan populasi BPPKAD Kabupaten Gresik.
- b) Variabel independen penelitian terdahulu menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitas sumber daya manusia.

2. Hermawan (2022)

Populasi penelitian terdahulu ialah seluruh pegawai BPKAD. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan kapasitas rendah, yakni hanya sepuluh responden. Hasil penelitian ini kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemda.

Persamaan penelitian:

- a) Menggunakan variabel independen kualitas sumber daya manusia.
- b) Sama-sama membahas terkait kualitas LKPD.
- c) Menggunakan sampel penelitian pada pegawai BPKAD.
- d) Menerapkan metode penelitian kuantitatif dan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian:

- a) Menggunakan variabel independen penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- b) Teknik pengambilan sampel jenuh dengan kapasitas responden yang sedikit, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pemilihan *purposive sampling* dengan total 46 orang.
- c) Lokasi yang digunakan penelitian berbeda, dimana peneliti terdahulu pada BPKAD Kota Kediri, sedangkan penelitian sekarang pada BPPKAD Kabupaten Gresik.

3. Gustina (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Kabupaten Indagiri Hilir. Populasi penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan bendahara keuangan. Hasil penelitian ini secara parsial sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Namun variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Persamaan penelitian:

- a) Sama-sama menggunakan variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern.
- b) Variabel dependen membahas kualitas LKPD.
- c) Termasuk pada penelitian kuantitatif

Perbedaan penelitian:

- a) Menggunakan dua variabel penelitian, sedangkan penelitian sekarang yang digunakan meliputi tiga variabel.
- b) Menggunakan populasi penelitian pada OPD di Kabupaten Indagiri Hilir. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan populasi pada pegawai BPPKAD di kabupaten Gresik.

4. Hamruna et al., (2022)

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan pengaruh pada kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas LKPD. Populasi penelitian yang berhasil dijadikan obyek adalah pegawai BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif kuantitatif. Hasil penelitian Sistem pengendalian internal pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD.

Persamaan penelitian:

- a) Menggunakan variabel dependen Sistem Pengendalian internal.
- b) Menggunakan variabel independen kualitas LKPD.
- c) Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner.

Perbedaan penelitian:

- a) Perbedaan variabel pada kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah.
- b) Merupakan jenis penelitian campuran, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- c) Lokasi penelitian sebelumnya dilaksanakan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

5. (Silfiani & Purnomowati, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi sistem informasi, kendala dan efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Serta sampel penelitian

pada 11 responden SKPD di Pemkab Magelang. Hasil riset menunjukkan implementasi SIMDA telah sesuai secara menyeluruh (mulai pada prosedur penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan), masih terdapat kendala tertentu yang menyebabkan efektivitas menurun. Salah satunya ialah kurangnya pengetahuan SDM. Implementasi SIMDA keuangan terbukti dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan sebelum menggunakan SIMDA.

Persamaan penelitian:

- a) Variabel dependen menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Penelitian ini membahas terkait analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda.

Perbedaan penelitian:

- a) Variabel dependen penelitian terdahulu menggunakan efektivitas implementasi, kendala dan solusi implementasi, dan pelaporan keuangan pemda.
- b) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
- c) Sampel penelitian mencakup pada SKPD Kabupaten Magelang.

6. (Innayatulloh & Siswanto, 2019)

Penelitian ini masih mencakup pembahasan terkait pengendalian intern dalam kualifikasi pemerintahan pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan variabel kualitas pengelolaan anggaran, pengendalian intern.



Persamaan penelitian:

- a) Menggunakan variabel independen pengendalian internal
- b) Menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintahan.
- c) Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian:

- a) Menggunakan variabel dependen kualitas pengelolaan anggaran
- b) Teknik pengumpulan data tidak menggunakan penyebaran kuesioner, melainkan mengambil data sesuai IHPS Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode 2015 – 2017.

7. Rahmany & Fatimah (2020)

Melalui penelitian ini, memberikan pemahaman terkait sejauh mana pengendalian intern yang efektif pada kualitas laporan keuangan pemda. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif deskriptif dan hasil riset didapatkan yang mana variabel sistem pengendalian intern pada BPKAD Bengkalis telah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Perbedaan penelitian hanya menggunakan satu variabel saja, dimana merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga penjelasan hanya dalam batas menjelaskan sistem intern pemerintahan itu sendiri, serta objek lokasi penelitian yang berbeda.

8. Ardianto & Eforis (2019)

Riset ini memakai *non probability sampling* dan *convenience sampling* yang mana populasi penelitian dilakukan oleh seluruh staf akuntansi SKPD Kabupaten Tangerang. Hasil Penelitian ini menunjukkan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

9. (Utami & Sulardi, 2019)

Pentingnya pengungkapan dalam laporan keuangan pada setiap pemda ialah sebuah keharusan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD. Hal tersebut juga dapat menentukan tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil Penelitian ini menemukan rerata pengungkapan pemda pada tahun 2017 terbilang relatif rendah yakni sebesar 60,24%. Variabel yang mempengaruhinya adalah Populasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pemda dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak populasi pada sebuah daerah, keperluan dalam peningkatan layanan publik dan fasilitas publik yang disediakan oleh pemda juga semakin tinggi. Begitu pula dengan IPM yang tinggi dapat menekankan pemda dalam pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Stewardship

Teori yang melandasi penelitian ini ialah teori *stewardship* dimana teori ini merupakan turunan dari teori keagenan. Donaldson dan Davids (1991) mengungkapkan teori *stewardship* merupakan situasi dimana tidak terdapat para manajemen memotivasi pada tujuan individu namun lebih memprioritaskan tujuan utamanya yaitu dalam kepentingan organisasi. Asumsi filosofi teori ini dibentuk dari sifat dalam manusia yakni dapat dipercaya, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, berintegritas serta kredibel pada pihak lain.

Untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi pemerintah perlu peran dalam memenuhi kebutuhan pada utilitas *principals* dan manajemen. Dalam studi akuntansi organisasi sektor publik ataupun non profit teori *stewardship* ini sudah diterapkan. Davis et al. (1997) menyatakan penatalayanan organisasi dimotivasi untuk memaksimalkan kinerja organisasi, sehingga dapat mencapai keberhasilan organisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah dijadikan sebagai *stewards*.

Akuntansi dalam organisasi sektor publik pada masa awalnya dikembangkan dan memiliki peran dalam memenuhi secara cukup dalam kebutuhan informasi bagi *stewards* maupun *principals*. Dalam hal ini akuntansi berperan sebagai kekuatan pendorong dibalik perubahan yang kini semakin beragam, terlihat pada pertumbuhannya dalam organisasi sektor publik. Merupakan tantangan yang



sulit bagi *Principal* untuk bekerja secara mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan. Adanya kaitan antara *principals* dengan *stewards* ini didasari oleh tingkat kepercayaan sesuai dengan keberhasilan organisasi.

Menurut (Hendri & NR, 2020 dalam Wahida, 2015) penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini ialah untuk dapat menguraikan bagaimana peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakatnya, menampung aspirasi masyarakat demi terwujudnya keberhasilan organisasi, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diberikan. Dalam pertanggungjawaban tersebut peran *stewards* yaitu bagi manajer serta pengaudit internal untuk dapat mengatur keefektifan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Warren, et al (2018:5) mengungkapkan akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyajikan suatu laporan yang dipakai oleh para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dalam konteks sistem akuntansi, menurut (Mulyadi, 2016, p. 3) Sistem akuntansi ialah kumpulan formulir, catatan serta laporan yang berguna dalam menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk mengorganisir pengelolaan bisnis. Serangkaian dalam sistem akuntansi ialah diawali pada input transaksi keuangan yang diproses dalam analisis transaksi baik catatan atau keluaran dalam bentuk laporan keuangan yang relevan.

Lebih lanjut dalam konteks akuntansi keuangan daerah menurut (Halim, 2007, p. 43) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dalam lingkup pemerintah daerah baik dalam kabupaten, kota atau provinsi yang mana dipergunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan yang diperlukan bagi pihak eksternal. Pihak eksternal pemda yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, analis dan pemerhati pemda, dan pemerintah pusat. Dalam hal ini penjelasan mengenai prosedur dalam akuntansi keuangan daerah mulai dari pengidentifikasian dimaksudkan pada identifikasi transaksi ekonomi, untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan transaksi ekonomi atau tidak. Pengukuran adalah bentuk metode atau proses yang ada dalam laporan keuangan apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Baik itu basis yang digunakan, atau standar akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, proses pencatatan diartikan sebagai proses yang mana untuk menentukan tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan. Terakhir, pelaporan dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana laporan keuangan tersebut sudah sesuai dan sudah mencakup pada laporan keuangan dari entitas akuntansi.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ialah bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang kegiatannya mulai prosedur, penyelenggara, peralatan untuk mewujudkan fungsi akuntansi analisis sampai dengan pelaporan keuangan dalam lingkup organisasi pemerintah daerah. Sedangkan menurut Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah ialah sistem akuntansi yang kegiatannya mulai dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta

pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pendapat kedua perspektif di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur akuntansi yang kegiatannya bermula dari perolehan data hingga pelaporan keuangan dalam sistem sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan akuntansi pemerintahan diungkapkan oleh Nurlan (2008:28) bahwa terdapat tiga komponen utama dalam tujuan akuntansi pemerintahan, diantaranya:

1. Akuntabilitas

Dalam hal ini dapat menghasilkan informasi keuangan secara lengkap dan tepat serta memiliki kegunaan penuh bagi pihak yang bertanggungjawab dalam operasi pemerintahan.

2. Manajerial

Menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan baik itu dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kegiatan pemantauan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus dapat memastikan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Prosedur Laporan keuangan pemda telah diperbaharui dan permendagri yang berlaku sekarang ialah PP No 71 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan pemda. Dalam penyusunan tersebut dibagi menjadi dua bagian:

1. Kertas kerja konsolidasi

Terdiri dari fungsi akuntansi entitas pelaporan yang selanjutnya dilaporkan dengan bantuan *spreadsheet*; fungsi akuntansi pemindahan data Neraca saldo ke kertas kerja konsolidasi; fungsi terkait jurnal penyesuaian konsolidasi; dan fungsi akuntansi neraca saldo pemda sesudah jurnal eliminasi.

## 2. Laporan keuangan konsolidasi

Meliputi kegiatan neraca saldo setelah adanya penyesuaian, menyusun CaLK, kemudian penyerahan LKPD, hingga pada kepala daerah menyampaikan LKPD tersebut kepada BPK.

Dari uraian berikut dapat menemukan titik persoalan yang mana laporan konsolidasi disini merupakan laporan yang diamanatkan langsung dari pemerintahan pusat. Yang mana akan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan juga komprehensif tentang keuangan pemda dan entitas yang terkait dengannya. Dengan demikian laporan keuangan konsolidasi merupakan dasar yang lebih akurat.

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Kualitas Sumber Daya Manusia menurut (Rahardjo, 2010) Kualitas sumber daya manusia bukan hanya ditentukan dalam keterampilan atau kekuatan fisiknya, melainkan juga dapat diamati dari pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalamannya ataupun kematangan dan sikap serta nilai-nilai yang dimilikinya. Berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh (Sumarjan, 2009 dalam Danim, 2012) mengutarakan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diimpikan dapat diamati dari kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas

sumber daya manusia adalah individu yang berperan dalam lingkup organisasi untuk mencapai tujuan dengan aspek yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman pekerjaan yang pernah dilalui.

Rahardjo (2010:18) mengungkapkan bahwa terdapat dua indikator dalam kualitas sumber daya manusia diantaranya:

1. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan), diantaranya:
  - a. Memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Memiliki pengetahuan Bahasa, baik itu Bahasa nasional, Bahasa daerah, dan sedikitnya satu bahasa asing.
2. Pendidikan
  - a. Mempunyai kemampuan pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Diartikan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan lebih mendalam di bidang tertentu yang menjadi keunggulan dan kontribusi kinerja dalam dunia kerja.
  - b. Mempunyai tingkat kualitas pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Hal ini menjadi nilai plus pada keterampilan yang sesuai yakni memiliki keahlian tertentu yang menonjol.

#### **2.2.4 Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Arens et al., (2011:316) Sistem pengendalian internl mencakup kebijakan dan prosedur yang disusun agar manajemen memperoleh kepercayaan bahwa perusahaan yang dijalankan sudah terlaksana sesuai tujuan dan sasaran. Dewan komisaris, manajemen, dan individu lainnya berperan dalam proses



pengendalian intern dalam membagikan kepercayaan penuh berdasarkan tujuan yang dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem pengendalian intern ialah proses menyeluruh pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara keberlanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan kepercayaan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang undang.

Terdapat tiga tujuan sistem pengendalian intern menurut Arens et al., (2011:316), diantaranya :

1. Keandalan laporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum atau professional untuk memastikan informasi telah disajikan itu sudah wajar dengan ketentuan standar pelaporan seperti General Accepted Accounting Principle (GAAP).

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi

Kegiatan pengendalian perusahaan dapat mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pengoptimalan sasaran.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik non publik maupun organisasi nirlaba selayaknya dapat memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sekurang-kurangnya terdapat lima unsur dalam sistem pengendalian intern, diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai perlu dapat menciptakan dan menjaga lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat memberikan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang baik.

2. Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melakukan penilaian risiko yang dijalankan oleh unit organisasi dari lingkungannya maupun luar organisasi. Kegiatan penilaian risiko, diantaranya:

a. Identifikasi risiko

Dimana didalamnya menggunakan uraian metode yang sinkron dengan tujuan instansi pemerintah; memanfaatkan penuh prosedur yang memadai; mengevaluasi faktor pemicu risiko

b. Analisis risiko

Analisis risiko dilakukan untuk menentukan akibat dari risiko yang diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan ini bertujuan dalam memastikan arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi: *review* atas kinerja instansi yang bersangkutan; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan

sistem informasi; pengendalian fisik oleh aset; pemisahan fungsi; akuntabilitas terhadap sumber daya, dokumentasi atas sistem pengendalian intern.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi ini diantaranya: dengan menyajikan serta menggunakan dengan baik pemanfaatan dan sarana komunikasi serta memajukan sistem informasi secara berkelanjutan.

#### 5. Pemantauan

Kegiatan ini bertujuan menilai kualitas kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat ditangani segera. Artinya pemantauan yang baik bisa menjadi kunci dalam organisasi pada tujuan dan merespons perubahan yang terjadi dengan sigap.

### **2.2.5 Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan berstruktur terkait laporan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan dalam pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah laporan keuangan ialah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dilakukan pada satu masa jabatan. Dapat disimpulkan pengertian dari laporan keuangan adalah proses akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan pada periode akuntansi dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2004) mengungkapkan tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya:

1. Menyajikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
2. Memberikan informasi dalam evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dimaksudkan pada pengevaluasian pencapaian tujuan, mengidentifikasi yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.

Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembantu dalam memperkuat transparansi yang mana hal tersebut merupakan tanggungjawab entitas. Laporan keuangan tidak hanya sekedar kumpulan angka, namun melingkupi cerminan terkait kebijakan dan keputusan kinerja. Di bawah ini diuraikan mengenai komponen yang ada pada LKPD mengacu pada Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pertama, laporan pelaksanaan anggaran meliputi::

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memberikan informasi tentang garis besar sumber pendanaan dan alokasi dana yang dikelola oleh pemda, Laporan realisasi memberikan gambaran mengenai perbandingan sejauh mana periode pelaporan yang direncanakan dengan yang direalisasi.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan ini berisi seluruh informasi mengenai kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dari tahun sebelumnya.

Laporan finansial, diantaranya:

1. Neraca. Mendeskripsikan posisi laporan posisi keuangan dijadikan sebagai gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang berkaitan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas yang ditentukan pada waktu tertentu.
3. Laporan Operasional. Didalamnya terdapat informasi mengenai sumber daya ekonomi yang mengalami peningkatan ekuitas serta penggunaannya dikelola oleh pemda pada periode pelaporan. Implementasinya nanti ditujukan pada pemerintah pusat atau daerah dalam waktu satu periode.
4. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas berisi laporan mengenai penjelasan kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang memberikan informasi saldo awal, saldo akhir, penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Menyertakan informasi mengenai kenaikan maupun penurunan ekuitas periode yang terjadi dengan periode pelaporan sebelumnya.
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Merupakan princiian angka yang tercantum pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK. Selain itu, CaLK memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi tersebut sesuai dengan SAP serta penyajian dalam laporan keuangan apakah sudah wajar atau tidak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan pemahaman terhadap komponen yang telah diuraikan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dalam pengelolaan keuangan.



## 2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Ayuningsih et al., 2022) Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan karena merupakan salah satu bentuk *good governance*, dimana kualitas pelaporan dapat menyalurkan manfaat bagi pendukung pengambilan kebijakan di masa periode selanjutnya dan apabila terwujud diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menangani persoalan kompleks, terutama persoalan sosial yang sedang terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang didapatkan dijadikan sebagai pendukung pengambilan keputusan serta mudah dipahami bagi pengguna laporan keuangan.

Terdapat tingkatan penilaian laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana hasil audit diberikan dalam bentuk opini, diantaranya: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini yang diberikan BPK memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kredibilitas laporan keuangan dalam entitas. Opini WTP dianggap sebagai hasil yang paling positif, karena secara keseluruhan informasi disajikan secara jelas. Sementara opini TW dan TMP menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang serius dalam laporan keuangan.

Dua hal lain yang merupakan faktor penting dalam menilai laporan keuangan yakni kepatuhan terhadap SAP, dan penyusunan melalui pada sistem SAPD. kepatuhan terhadap SAP memastikan bahwa laporan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku, lain halnya dengan SAPD dengan adanya SAPD

laporan keuangan pemda dapat mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja yang akurat sesuai pada perundang-undangan yang berlaku Ayuningsih et al., (2022).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, suatu laporan keuangan daerah akan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Relevan, artinya informasi yang termuat didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini serta dapat memprediksi masa yang akan datang juga berperan dalam mengoreksi hasil evaluasi masa lalu.
2. Andal, artinya laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan relevan namun jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Suatu informasi akan dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik jujur, dapat diverifikasi dan netral.
3. Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Sistem akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dimana mulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan untuk mewujudkan fungsi akuntansi analisis hingga pelaporan keuangan di lingkup organisasi pemerintahan daerah. Informasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah dibutuhkan untuk mendapatkan hasil keluaran laporan keuangan yang tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyajikan informasi laporan keuangan yang lengkap serta dipergunakan sebagai evaluasi di masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah.

Keterkaitan teori *stewardship* dalam penelitian ini, untuk dapat menguraikan peran pemerintah daerah sebagai instansi yang dipercaya dalam bertindak sesuai kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat. Pemerintah daerah sebagai *steward* dapat menerapkan serta mempraktekkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara akuntabel dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. artinya dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan tersebut kepada publik.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Binawati & Nindyaningsih, (2022) ; Gustina (2021) didapatkan hasil pengujian hipotesis bahwa penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kualitas laporan pemerintah daerah yang semakin baik. Berdasar uraian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditunjukkan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **2.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada literatur yang sudah dikaji, terdapat bukti yang menandakan kualitas sdm ini terdapat pengaruh. Temuan ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian menyetujui adanya pengaruh kualitas sdm terutama dalam bidang pendidikan yang relevan, serta berperan penting pada kualitas yang didapatkan. Menurut Rahardjo (2010:18) Kualitas sumber daya manusia bukan hanya ditentukan pada hal keterampilan atau kekuatan fisiknya saja, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan, pengalaman ataupun kematangan dan sikap serta nilai-nilai yang dimilikinya.

Asumsi filosofi teori *stewardship* ini dilandasi pada sifat dalam diri manusia seperti dapat dipercaya, bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas serta kredibel pada pihak lain. Dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang baik, serta memiliki kemampuan yang

sesuai dengan bidangnya diperlukan dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi sehingga dapat menjadikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian tersebut sepemikiran dengan penelitian Hermawan (2022) yang mengemukakan bahwa kualitas sumber daya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Kediri. Pegawai yang bersikap profesional dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsinya secara komprehensif, juga memberikan kontribusi terkait evaluasi dan pengambilan keputusan investasi atau keputusan ekonomi lainnya. Peneliti mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas individu tersebut dalam penyusunan laporan keuangan, maka semakin bagus pula laporan yang dihasilkan. Dimana sikap profesional dimiliki pegawai tersebut adalah peran dapat membantu memastikan keakuratan, keandalan, dan relevansi informasi yang disajikan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diajukan hipotesis berikut:

**H2: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**



### **2.3.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah meruokan proses menyeluruh dari kegiatan dan tindakan yang dilakukakan secara berlanjut oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan kepercayaan dalam pencapaian tujuan organisasi meelalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang. Sistem pengendalian internal mempunyai peran besar dalam tindakan kecurangan pelaporan keuangan pada instansi pemerintahan maupun perusahaan. Pengendalian intern dapat mengarahkan lingkungan agar lebih terjaga atau terkontrol dalam kesalahan pelaporan. Sehingga spi dapat menimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan dalam lingkup pemerintahan.

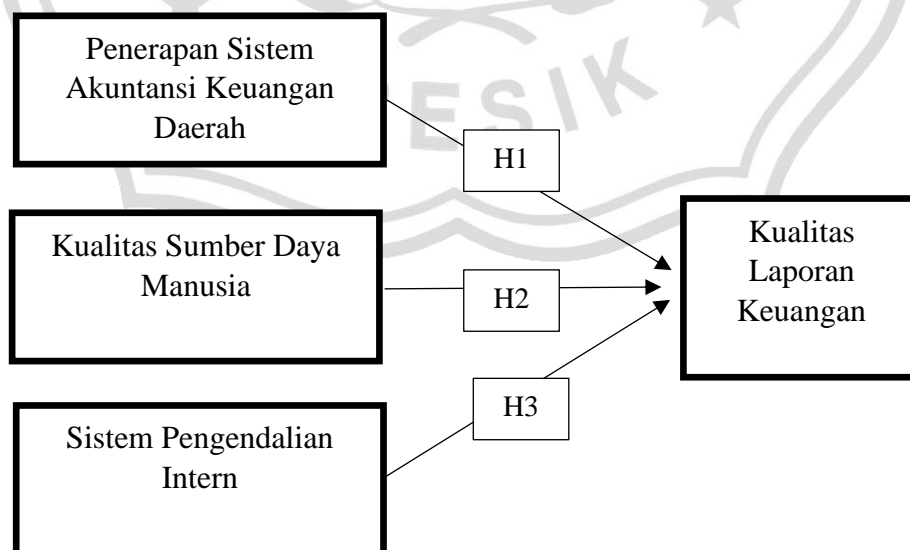
Implikasi teori *stewardship* dalam sistem pengendalian intern adalah peran bagi *stewards* (manajer dan auditor internal) dalam keefektifan pengendalian internal dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dapat diartikan berarti pimpinan organisasi pemerintahan untuk dapat memberikan contoh yang baik dalam hal integritas, serta komitmen terhadap pengendalian intern yang kuat. Teori ini mendorong adanya transparansi government. Adanya kebijakan dan prosedur memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, audit internal yang tepat sasaran, juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Rahmany & Fatimah (2020) dan Binawati & Nindyaningsih (2022) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar uraian yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditunjukkan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual membahas keterkaitan fakta antara landasan teori dengan kajian yang dimuat oleh peneliti. Dalam kerangka konseptual dapat menentukan seberapa pengaruhnya variabel dalam penelitian yang dilakukan. Menjelaskan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Sumber : Data diolah peneliti